

PERAN GEREJA KATOLIK DALAM MEMPERJUANGKAN KEMANUSIAAN ATAS KONFLIK DI MALUKU

Innocentius Larat

Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon.

Email: innocent_larat@yahoo.com

ABSTRAK

Kemanusiaan merupakan sifat, karakter atau nilai tertinggi yang harus dihargai dan diperjuangkan sepanjang hidup. Berbicara tentang kemanusiaan berarti merefleksikan tentang hidup, hak dan kewajiban seorang manusia yang secara alami sudah ada padanya. Di Indonesia, khususnya di Maluku, sejarah mencatat bahwa pernah terjadi konflik kemanusiaan pada tahun 1999-2003/2004. Konflik ini memberikan dampak negatif bagi masyarakat dalam hal keamanan, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Tujuan dari penelitian ini ingin mengangkat kembali upaya-upaya perjuangan Gereja Katolik di Maluku yang turut berperan sentral dalam memperjuangkan perdamaian atas konflik kemanusiaan yang terjadi di Maluku. Gereja Katolik yang juga menjadi bagian dari masyarakat Maluku berani menyuarakan kemanusiaan yang telah terdegradasi. Uskup Keuskupan Amboina (1998-2022), Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC, berupaya keras untuk memperjuangkan dan mengangkat kembali nilai kemanusiaan dengan cara mendukung upaya perdamaian, dialog, meningkatkan mutu pendidikan, ekonomi, dan mengupayakan toleransi antar umat beragama dalam masyarakat Maluku. Penulis menggunakan metode kualitatif yang mana mengumpulkan dan mendeskripsikan data berdasarkan studi kepustakaan tentang peran Gereja Katolik dalam konflik kemanusiaan di Maluku.

Kata kunci: Kemanusiaan, Gereja Katolik, Konflik Maluku.

ABSTRACT

Humanity is a trait, character or value that must be respected and strived for throughout life. Talking about humanity means reflecting on life, the rights and obligations of human being that naturally exist in him. In Indonesia, especially Maluku, history records that there was a humanity conflict in 1999 to 2003/2004. This humanity conflict has a negative impact on society in terms of security, economy, social and education. The purpose of this research is to highlight the efforts of the Catholic church in Maluku which plays a central role in fighting for peace over the humanitarian conflict in Maluku. The Catholic church which is also part of the Maluku people dares to voice humanity that has been degraded. Bishop Petrus Canisius Mandagi MSC of Amboina Diocese seeks to fight for revive noble human values by supporting efforts for peace, dialogue, improving the quality of education, the economy and seeking inter-religious tolerance in Maluku society. The author uses a qualitative method which collects and describes data based on literature studies on the role of the Catholic church in the humanity conflict in Maluku.

Keywords: Humanity, Catholic church, Maluku conflict.

PENDAHULUAN

Maluku merupakan sebuah provinsi kepulauan di wilayah Indonesia Timur yang kaya akan keberagaman etnis, budaya, bahasa dan agama. Sama halnya dengan daerah lain, Maluku merupakan daerah aman yang diikat dengan adat istiadat yang kuat sejak lama, dan adat solidaritas itu membudaya dalam darah anak Maluku (Safi, 2017:34). Kedatangan pendatang asing (Portugis, Belanda, Jepang, Arab) tidak semua disukai oleh orang Maluku karena bahwa wilayahnya akan dikuasai, hasil bumi dijarah, penduduk dipekerjakan secara paksa, sehingga adanya perlawanan (perang) dari beberapa pejuang seperti Patimura, Sultan Babullah, Sultan Nuku, dan pahlawan Maluku lainnya, yang bertahun-tahun mempertahankan wilayah dan hasil bumi Maluku dari para pendatang asing (Safi, 2017:35).

Setelah Indonesia merdeka sebagai sebuah negara independen, Maluku telah memiliki perubahan salah satunya yakni tali persaudaraan dan persatuan yang telah ada sejak dahulu semakin dipererat. Perkembangan Maluku tidak hanya dalam hal budaya, tapi juga berkembang dalam aspek religius dimana masyarakat bebas memilih agamanya, dan hingga sekarang sekitar 5 agama yang mendiami Maluku diantaranya Katolik, Islam, Protestan, Hindu dan Budha. Karena pengaruh pendatang asing, maka sebagian besar masyarakat Maluku yang notabene memiliki kepercayaan lokal (animisme) kini menganut agama penjajah (Kristen dan Islam), sedangkan Hindu dan Budha masuk ketika adanya pendatang dari Jawa, Bali dan sekitarnya.

Perbedaan agama tidak memutuskan persaudaraan yang telah membudaya dalam kehidupan orang Maluku, melainkan lewat perbedaan agama masyarakat Maluku semakin saling menghormati antara satu dan yang lain. Gereja Katolik di Maluku (dikenal sebagai Keuskupan Amboina) merupakan salah satu agama yang berkembang pesat dan mendorong agar umatnya mengedepankan persaudaraan antar sesama golongan. Bukan hanya soal kapasitas anggota gereja, namun lewat gereja banyak orang dapat berperan serta dalam membangun peradaban masyarakat. Etika, karakter, kemanusiaan dan toleransi merupakan nilai-nilai baik dan positif yang selalu diajarkan oleh Gereja untuk dunia laksanakan.

Gereja sendiri berasal dari cinta kasih Allah yang kekal untuk manusia ciptaanNya, didirikan oleh Putra Tunggal-Nya Yesus Kristus dan dihimpun dalam penyertaan Roh Kudus hingga saat ini (Dokpen KWI, Gaudium et Spes, 2021:62)¹. Mereka yang telah dipanggil-Nya menjadi anak Allah merupakan bagian juga dari masyarakat plural. Lewat ini, Gereja telah menghadirkan relasi yang intim dengan lingkungan masyarakat dunia. Secara langsung Yesus Kristus tidak hanya sekedar membangun Gereja, namun menyelenggarakan berbagai peran dan gerakan yang berjasa banyak bagi masyarakat dunia.

Maluku dan agama-agama khususnya Gereja Katolik di Maluku memiliki misi yang sama yakni persaudaraan dalam kasih bersama sebagai orang Maluku yang berbudaya dan beragama. Kehidupan beragama saling berdampingan dan tidak mempunyai gesekan yang berarti sehingga rasa solidaritas inilah yang turut memperkuat semboyan *pela-gandong* yang mengedepankan persaudaraan antar orang Maluku (Jamin Safi, 2017:35). Rasa solidaritas yang membudaya itu

¹Selanjutnya disingkat (GS).

hancur ketika peristiwa kelam yang terjadi di Maluku. Salah satu peristiwa sejarah kelam yakni konflik Maluku pada tahun 1999 hingga 2003/2004 memberikan peluang bahkan tantangan yang besar bagi konsistensi Gereja dalam misi kemanusiaan. Konflik Maluku banyak melahirkan dampak negatif yang mengakibatkan banyak hal terjadi antara lain perusakan harta benda dan fasilitas publik maupun pribadi, pemaksaan atau konversi agama, dan bahkan penderitaan dan kematian manusia (Jerry Indrawan,dkk, 2021:12). Kasus ini akibat ulah manusia yang memulai, menyebarkan, memfitnah bahkan memprovokasi keadaan hingga membesar menjadi pertikaian agama. Orang-orang dengan mengatas-namakan agama sudah saling mencurigai, meneror, menyerang bahkan membunuh sesama manusia.

Namun masih ada mereka yang beragama yang memperjuangkan perdamaian demi misi kemanusiaan. Salah satu peran di dalamnya yakni Gereja Katolik yang dibantu oleh beberapa tokoh agama Protestan, Islam, Hindu, Budha, Pemerintah, Ormas, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Maluku yang ingin hidup dalam kedamaian. Atas permasalahan yang terjadi, maka menjadi pertanyaan mendasar ialah bagaimana upaya peran Gereja dalam memperjuangkan kemanusiaan pada konflik tersebut? Siapa saja tokoh-tokoh pelaksana perdamaian yang berupaya dalam mendamaikan situasi konflik tersebut?. Penelitian ini terbatas pada situasi konflik yang terjadi di Ambon.

METODE

Metode penelitian adalah suatu cara kerja ilmiah, dimana peneliti dapat mendapatkan suatu data yang benar (valid) dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat dikembangkan dan dibuktikan melalui riset tertentu. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah secara kualitatif. Hal ini membuat sehingga metode penelitian ini lebih bersifat deskriptif yang memfokuskan pada pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang diteliti. Metode kualitatif ini menekankan pada kualitas gambaran peristiwa yang jelas serta sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan cenderung banyak menggunakan teknik analisis atas kepustakaan. Dengan metode ini, penulis berusaha untuk dapat mengungkapkan makna akan sejarah berdasarkan analisis deskriptif terhadap masalah yang terjadi yang tentunya tidak diukur dengan mudah menggunakan numerik. Teknik penulisan ini ditempuh melalui beberapa tahapan yaitu pemilihan topik, sasaran atau objek yang dituju, pembatasan masalah, interpretasi dan analisa deskripsi berdasarkan sumber kepustakaan. Pemilihan topik ini difokuskan pada peran Gereja dalam masalah kemanusiaan yang terjadi di Maluku terkhususnya Kota Ambon. Sasaran penelitian ini berbasis pada sejarah masalah kemanusiaan yang mencakup perjuangan dalam wilayah kota Ambon. Teknik dalam pemenuhan data yakni penulis lebih menginterpretasi data yang dengan cara menelaah beberapa buku, jurnal dan dokumen lainnya yang diyakini relevan dalam tulisan ini. Lewat data yang telah ada, maka penulis menggunakan teknik analisis deskriptif terhadap data yang ada kemudian memberikan novelty/kebaruan atas permasalahan yang terjadi. Dalam pembahasan tulisan ini membatasi pokok pemikiran dan problematika pada peran Gereja Katolik Keuskupan Amboina dalam konflik tersebut khususnya di kota Ambon, namun tidak menutup kemungkinan pada fakta bahwa Gereja

tidak bergerak sendiri melainkan ada bantuan dan dorongan dari kelompok agama lain beserta dengan pemerintah dan seluruh tokoh masyarakat di Maluku.

PEMBAHASAN

I. Gereja Katolik di Maluku

1.1. Sejarah Singkat Agama Katolik di Maluku

Pada tahun 1534 seorang pedagang Katolik asal Portugis yang bernama Gonsalo Velozo yang kemudian dikarenakan tidak adanya pelayan pastoral, maka ia membaptis beberapa orang yang saat itu ingin menjadi katolik di Mamuya, Maluku Utara. Kemudian pada tahun 1538 sekitar 400 orang warga Ternate datang ke Hative dan dibaptis oleh seorang misionaris Portugis. Pada 14 Februari 1546, Santo Fransiskus Xaverius tiba di Hative dan membangun sebuah kapel di Hative. Rentan waktu tahun 1606 dan 1610, para misionaris Ordo Fransiskan dan Ordo Dominikan tiba di Ternate. Pada 1 Juli 1888, P. Johannes Kusters SJ dan P. Johannes Booms SJ tiba di Tual dan Langgur, Kepulauan Kei. Tanggal 22 Desember 1902, Propaganda Fide memutuskan wilayah Maluku menjadi bagian dari Prefektur Apostolik *Nouva Guinea Olandese* (Belanda New Guinea) dan menetapkan Langgur sebagai pusat misi di seluruh wilayah tersebut. Prefektur ini adalah provinsi gerejawi pertama yang otonom di luar Vikariat Batavia (sekarang Keuskupan Agung Jakarta). Kedatangan Misionaris MSC tanggal 28 November 1903 semakin mendukung karya pewartaan. P. Mathias Neyens MSC sebagai prefek apostolic waktu itu mengembangkan misi ke wilayah Kei Besar, Kepulauan Tanimbar, Pulau Ambon dan Ternate.

Pada Juli 1921, Vikaris Apostolik pertama Mgr. Arnoldus Johannes Hubertus Aerts MSC tiba di Langgur. Mgr. Aerts kemudian menahbiskan pastor asal Kei yaitu P. Eusebius Jamco pr pada tanggal 30 Juli 1942. Pada 1947, P. Jacobus Grent MSC ditunjuk sebagai pengganti Mgr. Johannis Aerts MSC. Pada 1960 pusat vikariat dipindahkan dari Langgur ke Ambon. Setelah hierarki Gereja Katolik Indonesia berdiri pada 1961, Mgr. Andreas Peter Cornelius Sol MSC diangkat sebagai Uskup pertama. Pada 1994 Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC ditahbiskan menjadi Uskup yang kedua dan sejumlah imam diosesan semakin berkembang. Pada tanggal 8 Desember 2021 pada Hari Raya Santa Maria Dikandung Tanpa Noda Asal, Paus Fransiskus memilih Pastor Seno Inno Ngutra sebagai Uskup Keuskupan Amboina, dan Uskup Mandagi ditetapkan untuk memimpin Keuskupan Agung Merauke. Keuskupan Amboina kini berkembang pesat berkat tuntunan Roh Kudus lewat perjuangan para misionaris hingga saat ini. Pusat Gereja Katolik Keuskupan Amboina bertempat di Jl. Patimura 26, Kota Ambon, provinsi Maluku, Indonesia (*Disandur dari tulisan Vikaris Jenderal Keuskupan Amboina RD. Bernard Antonius Rahawarin, Jumat 24 Februari 2023*).

1.2. Peran Gereja Katolik dalam Masyarakat

Istilah Gereja berasal dari bahasa Yunani *ekklesia*, dan diterjemahkan dalam bahasa Latin *Ecclesia*, dan bahasa Portugis *igreja*. Dalam Gereja mula-mula, kata *ekklesia* berasal dari kata

kerja *kaleo* yang berarti mereka yang dipanggil keluar. Maka Gereja bukan berarti sebuah bangunan semata, namun arti terdalam dari Gereja ialah persekutuan umat Allah yang dipanggil untuk berhimpun danewartakan tentang Kerjaan Allah di tengah-tengah dunia (David Ming, 2021:2). Demikian Gereja Katolik Keuskupan Amboina turut berperan penting dalam hal membangun hidup kemasyarakatan dalam hal kemanusiaan. Gereja Keuskupan Amboina tidak menghindarkan diri dari kemajuan peradaban, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan Gereja Keuskupan Amboina hadir disana sebagai bagian dari manusia yang menjadi inti/sumber kemajuan masyarakat. Kerap kali dalam hal peran dan pembangunan, selalu dikaitkan dengan pembangunan politik, ekonomi dan penekanan pada pemenuhan upah, barang dan jasa, dengan melupakan pembangunan manusianya (Mandagi, 2009:5). Negara menjadi aman tanpa perang, korupsi, masalah amoral, dan masyarakat menjadi damai dan tentram jika semua itu dimulai dari manusia. Manusalah yang menjadi pelaku segala sesuatu termasuk peradaban dan perkembangan dalam dunia ini terjadi.

Pembangunan manusia merupakan langkah positif dalam membebaskan manusia dari kemiskinan badani, spiritual, intelektual dan karakter yang mencakup seluruh kehidupan manusia. Gereja Keuskupan Amboina lebih berperan dalam membangun manusia melalui aspek batiniah sebagai bentuk penyempurnaan diri manusia (GS:35). Peran sentral dari Gereja Keuskupan Amboina ialah membangun manusia yang berbudi luhur dan disiplin. Bimbingan Gereja Keuskupan Amboina yang mengajarkan dan mendorong umat beriman agar berperilaku sederhana dalam kerendahan hati. Sederhana tidak berarti miskin harta, jasa dan pengetahuan, namun meliputi cara hidup yang rohani seperti sabar, murah hati, tidak bertengkar, tidak sombong, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak dendam, dan sebagainya (Kitab Suci 1kor 13:4-7). Pembangunan manusia terlebih khusus membangun budaya kasih bagi sesama manusia dari berbagai ras, budaya, dan golongan agama. Anjuran dari Gereja bagi umat beriman yang notabene merupakan kelompok masyarakat agar membangun nilai-nilai karakter itu dari dalam keluarga. Disana gereja senantiasa membimbing para keluarga melalui paroki, stasi, rukun bahkan komisi-komisi yang berhubungan dengan keluarga agar misi ini tidak hilang tetapi terjaga dan berkembang terus. Selain itu, Gereja Katolik menanamkan nilai disiplin kepada umat beriman. Hal ini sangat terlihat jelas dalam persekolahan, kantor-kantor, gereja-gereja paroki yang disiplin. Kedisiplinan bukan berarti soal waktu saja melainkan tentang kepatuhan terhadap aturan-aturan, memegang teguh nilai-nilai moral yang baik dan menghidupi berbagai ketentuan bersama demi kesejahteraan bersama (Mandagi, 2013:11). Hal ini terlihat bahwa Gereja mengajarkan dan mendorong umat beriman agar patuh terhadap hukum negara dan ketentuan pemerintah baik berskala nasional hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, kelurahan/kecamatan, desa/dusun, dan RT/RW. Nilai-nilai ini menjadi pegangan hidup umat beriman dalam kehidupan bermasyarakat.

II. Krisis Kemanusiaan di Maluku

2.1. Kemanusiaan yang hilang di Maluku

Perjuangan besar Gereja Katolik di Maluku dalam mempertahankan kemanusiaan yang adil dan beradab ternyata tidak berjalan mulus. Begitu banyak tantangan bagi Gereja ketika sedang berjuang demi kemanusiaan di tengah peradaban yang moderen. Salah satu peristiwa terjadinya konflik kemanusiaan di Maluku ialah pada peristiwa konflik yang bernuansa SARA pada tahun 1999 hingga 2003/2004. Dalam peristiwa itu peran gereja melalui sang gembala keuskupan yakni Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap peristiwa yang mengorbankan kemanusiaan. Peristiwa ini menjadi sejarah kelam hilangnya rasa kemanusiaan yang telah dipupuk sejak lama, baik ditingkat desa, kota, provinsi hingga menjadi masalah nasional. Banyak orang yang kehilangan materi, keluarga bahkan nyawa. Emosi, provokasi, egois, intoleransi, dan dendam seakan membara dihati semua orang yang ingin melampiaskan amarah dan kecewa. Berikut ini akan dijelaskan beberapa poin yang menyangkut dengan hilangnya kemanusiaan di Maluku.

a. Hilangnya Perdamaian dan Toleransi

Intoleransi menjadi poin penting dalam peristiwa ini. Semenjak kerusuhan terjadi, semua orang saling menyalahkan agama orang lain tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang mayoritas dan minoritas, berkuasa dan tidak berkuasa. Rumah-rumah ibadat dihancurkan oleh orang-orang yang beragama, eksploitasi wilayah kekuasaan dan waktu-waktu ibadah harus sesuai dengan yang mayoritas. Dalam data Laporan POLDA Maluku 11 Maret 1999 tercatat bahwa jumlah kerugian harta benda meliputi: 11 Gereja dan 19 Masjid dan Mushola dihancurkan (Suparlan, 2001:2) . Ada momen dimana oknum-oknum islam garis keras menggunakan bulan suci Ramadhan sebagai kesempatan untuk memusuhi sesama yang beragama lain. Sama halnya juga dengan ketika menjelang Natal sebagai ajang dan dipakai oleh oknum-oknum Kristen untuk bertindak arogan terhadap islam (Wuritmur, 2019:125). Agama dipakai bukan sebagai sarana cinta kasih namun sebagai alat untuk menghancurkan dan memusuhi sesama yang lain. Kecenderungan ini memuncak dan terselubung dalam motif agama. Kendati tidak selalu diawali dengan niat penistaan agama, namun dampaknya tak terkendalikan sehingga mudah saja ditafsirkan sebagai serangan terhadap kelompok islam maupun Kristen.

b. Kemerosotan Pendidikan

Pendidikan seharusnya menjadi ujung tombak dalam pembangunan kemanusiaan. Lewat pendidikan nilai-nilai pancasila dan karakter diajarkan bagi semua orang. Dengan adanya konflik, mutu pendidikan di Maluku semakin rendah bahkan para pelajar tidak memperoleh haknya untuk menerima pelajaran dengan baik dan tenang. Semua siswa yang bersekolah di wilayah kota Ambon dirumahkan karena konflik yang mengancam keselamatan. Berbagai fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, sarana taman kanak-kanak dibakar dan dihancurkan. Para pelajar tidak memperoleh perhatian dan bimbingan yang intensif dan efektif dari pihak sekolah dalam hal

pelajaran, maupun pemerintah dalam hal bantuan sarana-prasarana. Semuanya fokus pada konflik yang terjadi, maka para pelajar di sekolah tidak diperhatikan dan berjuang sendiri untuk memperoleh pendidikan yang layak (Wuritmur, 2019:122). Proses pendidikan menjadi terbengkalai dan mengakibatkan banyak anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan dengan baik dikarenakan konflik tersebut. Kerusakan ini bukan hanya menghancurkan manusia namun juga dengan peradaban kemanusiaan yang sementara menjalani pendidikan di sekolah. Ancaman dari konflik ini serentak merosotkan pendidikan yang adalah jantung peradaban kemanusiaan.

c. Hancurnya Perekonomian

Selain intoleransi dan pendidikan, ekonomi pun menjadi lemah dan hancur akibat konflik tersebut. Ekonomi menjadi titik sentral kebutuhan hidup manusia. Hancurnya perekonomian maka kemanusiaan pun turut bermasalah. Semua orang berlomba-lomba dalam keancaman untuk bertahan hidup sendiri dan keluarga. Semua orang tidak dapat bekerja karena merasa terancam nyawanya. Kegiatan ekonomi menjadi mandek. Bahkan hasil penelitian membuktikan bahwa Maluku semasa konflik mengalami kebangkrutan yang tinggi mencapai minus 27,38%. Semua fasilitas yang mendorong perekonomian masyarakat dihancurkan seperti 3267 rumah, 140 mobil, 109 sepeda motor, 4 pasar, 284 pertokoan, 565 warung/kios, 3 hotel, 2 Bank, 1 bioskop dan mall/swalayan, 11 kantor pemerintah, dan sarana perdagangan lainnya (Suparlan, 2001 :2). Masyarakat mencari nafkah dengan susah payah dan dalam kewaspadaan yang luar biasa karena konflik ini. Banyak orang yang sengsara karena kelaparan, mencari makanan dan minuman yang sulit, bahkan harus berkorban materi yang banyak untuk bisa bertahan hidup. Banyak masyarakat yang tidak tahan hidup di dalam kota dan memilih mengungsi desa-desa pinggiran maupun ke hutan/kebun hanya untuk mencari makanan agar dapat hidup (Wuritmur, 2019:123). Selain itu, konflik ini pun mengakibatkan banyak terjadi pengangguran karena tidak ada lapangan pekerjaan, sementara itu harga jual beli kebutuhan hidup melonjak tinggi. Setidaknya jumlah anak muda dinawah usia 25 tahun (selain menjalani pendidikan) yang kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan (Riyanto, 2016). Kini sebagian besar masyarakat hidup menderita akibat konflik di daerahnya sendiri. Mandeknya perekonomian diakibatkan juga dari pemasukan dana khas daerah lewat sektor pariwisata kota Ambon yang terkenal oleh para pengunjung dalam dan luar Ambon berhenti total. Tercatat bahwa data pada tahun 1996 hingga 1998 jumlah pengunjung kota Ambon mencapai 54.886 jiwa. Sedangkan dibandingkan pada kerusakan Ambon pada tahun 1999 hingga 2003/2004 dan sesudah konflik, pengunjung pariwisata Ambon berkurang hingga 29.000 jiwa (Dinas Pariwisata tingkat I Prov. Maluku, 2015). Tumbangnya perekonomian lewat perdagangan, lapangan pekerjaan, peningkatan kemiskinan, mandeknya sektor pariwisata, dan bahkan pemerintah kehabisan dana untuk mengatasi konflik tersebut.

d. Banyaknya Korban dalam Kerusakan

Berlangsungnya konflik dengan jangka waktu yang cukup lama mengakibatkan banyak hal yang dikorbankan, rumah dibakar, pembunuhan, penembakan, saling menyerang. Kerusakan di Maluku ini telah menelan banyak korban bahkan mencapai ribuan orang (Uskup Mandagi). Selain korban yang meninggal, banyak juga yang korban pekerjaan, sekolah, toko, tempat dagangan,

kantor pemerintahan dan bahkan rumahnya sendiri (Wuritmur, 2019:107). Ratusan ribu orang mengungsi dan kehilangan semua yang dimilikinya terutama ketenangan dalam hidup dan nyawa. Menurut data jumlah korban manusia akibat kerusuhan tersebut mencapai hampir 5.000 orang yang ditemukan dan didaftarkan, sedangkan belum diketahui dengan pasti bahwa sekitar puluhan orang lainnya yang belum didaftarkan (Anisa, 2021). Ruang publik berubah menjadi medan perang antar sesama (Riyanto, 2016). Karena kehilangan semuanya dan demi menghindari dari bahaya yang mengancam, maka sekitar 17.000 orang yang mengungsi ke daerah Sulawesi dan sekitarnya, Tanimbar, Kei dan sekitarnya, bahkan banyak pula korban orang Kristen yang di-islamkan secara paksa oleh oknum-oknum perang (Jerry Indrawan, 2021:19). Semua ini telah menjadi korban dari konflik yang diciptakan oleh manusia sendiri. Tujuan Maluku sebagai wilayah harmoni dengan penuh persaudaraan menjadi hancur seketika. Semboyan *pela gandong/ale rasa beta rasa* tidak cocok lagi digaungkan dalam hidup bersama di Maluku.

III. Peran Gereja memperjuangkan Kemanusiaan

Peran Gereja Keuskupan Amboina dalam memperjuangkan kemanusiaan di Maluku semata-mata bukan semata-mata aspek materil, sosial, politik atau ekonomi, tapi bersifat keagamaan. Keagamaan pun bukan hanya bersifat ajaran-ajaran keagamaan saja melainkan menyentuh kehidupan manusia yang harus dihormati dan dihargai. Gereja Keuskupan Amboina menjadi salah satu Gereja di dunia yang turut menjalankan amanat misi Kristus yakni mengantar jiwa-jiwa kepada Kristus. Dalam misi tersebut bukan hanya soal ibadah, namun termasuk di dalamnya yakni ajaran iman tentang menghargai sesama manusia (Mat 22:37). Hal mengasihi dapat terjadi ketika sudah memaafkan dan menghormati sesama manusia. Inilah dasar hidup iman Katolik hingga saat ini, maka tak jarang Gereja Katolik selalu menyuarakan tentang kasih dan perdamaian agar kehidupan manusia tidak menjadi korban dari sesama manusia lain yang meliputi materil dan moril (GS:79). Demikianlah Gereja Keuskupan Amboina sangat menghargai dan mendukung segala bentuk upaya demi perkembangan, kesatuan sosial yang sehat dan toleransi manusia. Gereja Katolik Keuskupan Amboina ingin menegaskan dan menunjukkan bahwa adanya upaya solider dan dan persatuan dunia yang sejati bersumber dari iman dan cinta kasih yang dibimbing Roh Kudus (GS:42). Maka atas dasar inilah, akan dibagikan beberapa pokok pikiran dari setitik peran dari Gereja Katolik Keuskupan Amboina dalam perjuangan membangun kemanusiaan di tengah problem Maluku.

3.1. Gereja Katolik: Mendukung upaya perdamaian

Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC merupakan uskup Keuskupan Amboina yang kedua setelah Mgr. Sol. Beliau merupakan gembala sekaligus wajah dari Gereja Katolik di Maluku yang berani menyuarakan perdamaian. Mgr. Mandagi menampilkan wajah Gereja Katolik yang cinta damai dan toleransi terhadap sesama. Jika dilihat lebih cermat, melihat Uskup Mandagi berarti melihat Gereja Katolik, begitu juga sebaliknya ketika mengenal Gereja Katolik Amboina berarti mengingat sosok pemimpin Gereja yakni Mgr. Mandagi. Gerakan mengedepankan perdamaian

bukan semata-mata karena faktor ekonomi, politik, sosial dan seterusnya melainkan karena ingin berjuang memanusiaikan manusia yang bermartabat (GS: 42). Segenap perjuangan membuka mata umat beriman bahwa yang diperjuangkan yakni kemanusiaan yang bermartabat dihadapan Allah dengan cara “pastoral kemanusiaan”.

Salah satu seruan uskup Mandagi yakni dalam surat gembala Natal tahun 1999 mengemukakan keprihatinan kerusakan Maluku yang merusak citra *pela-gandong* yang menjadi ikon dan lambang persaudaraan masyarakat Maluku. Dalam suratnya Uskup Mandagi mengajak umat agar terus memperjuangkan perdamaian serta menghentikan pertikaian, permusuhan dan sikap saling curiga (Mandagi, 2013:141). Perayaan Natal seharusnya menjadi perayaan sukacita dan damai karena lahirlah Sang Juruselamat yang membawa perdamaian dan bukan permusuhan, tandasnya. Seruan ini mengantar, membuka hati, memprovokasi pola pikir masyarakat Maluku agar menghentikan kerusakan dan menyambut tahun baru yang penuh dengan damai. Selain lewat surat gembala, beliau berupaya bekerjasama dengan tiga jenis pendekatan. Pertama pendekatan keamanan dimana bekerjasama dengan pihak keamanan seperti polisi dan tentara. Kemudian Maluku mendapat bantuan keamanan lewat Panglima Trikora, Kostrad dari Makasar dan pasukannya dalam penanganan konflik (Wuritimur, 2019:335). Kedua pendekatan persuasive yang bekerjasama dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pemerintah daerah dalam mengupayakan perdamaian Maluku. Ketiga pendekatan kekeluargaan dimana uskup sendiri yang turun ke jalan, lapangan, ke Masjid, Gereja, tempat kerumunan masa untuk mengajak menghentikan konflik, agar tidak terprovokasi isu agama dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan (Wuritimur, 2019:336). Tidak sedikit perjuangannya demi kemanusiaan lewat upaya seruan damai, hingga upaya ini menjadi salah satu metode yang berhasil dalam menghentikan pertikaian di Maluku.

3.2. Perjuangan membangun Kemanusiaan

Dalam perjuangan membangun kemanusiaan, Gereja berusaha agar setiap orang dapat memperoleh kembali martabatnya sebagai manusia yang telah terdegradasi akibat konflik. Maka Gereja mengusahakan tiga hal pokok sekaligus membantu pemerintah dalam membangun kembali peradaban kemanusiaan pasca konflik yakni: memulihkan kembali pendidikan kemanusiaan melalui persekolah Katolik, memperjuangkan perdamaian lewat seruan gembala Uskup dan usaha-usaha menciptakan toleransi, dan membantu pemerintah dalam mengupayakan pemulihan ekonomi.

3.2.1. Memulihkan pendidikan lewat Persekolahan Katolik

Dalam memperjuangkan kemanusiaan yang berkarakter haruslah melalui pembinaan dan pendidikan yang layak. Pendidikan bertujuan untuk merubah pola pikir yang baik, membina karakter yang bermartabat, serta menanamkan nilai-nilai moral bagi generasi penerus Gereja dan bangsa (GS:61). Akal budi, kepribadian, psikomotorik dan skill diri dipupuk, dilatih dan dibina dengan baik melalui pendidikan atau sekolah. Inilah salah satu misi Gereja dalam membangun kemanusiaan di Maluku melalui sektor pendidikan. Pendidikan yang dilangsungkan oleh Gereja

yakni pendidikan rohani dan jasmani. Pendidikan rohani menyangkut dengan pembinaan dan pengajaran/katekese iman terhadap umat beriman dalam khotbah, renungan, rekoleksi, ceramah, dan sebagainya, sedangkan dimaksud dengan pembinaan jasmani ialah jenjang pendidikan di sekolah dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Tugas Gereja yakni sebagai sekolah iman/agama yang paling utama bagi umat beriman dalam membina iman maupun karakter yang dijabarkan dalam pembinaan iman dan pendidikan di sekolah. Pengajaran Gereja membantu umat beriman agar paham dan laksanakan tentang tugas perutusanya di dunia sebagai penyalur cinta kasih, persaudaraan, toleransi dan keadilan bagi seluruh alam ciptaan melalui kelima tugas Gereja (Mandagi, 2009:254).

Pendidikan lain yang membangun kemanusiaan yakni pendidikan di sekolah. Pasca peristiwa kemanusiaan itu, Gereja kembali memperjuangkan dan membangun kembali sekolah-sekolah agar segenap masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang layak. Gereja telah berusaha memperluas sarana dan pelayanan kemanusiaan lewat pendidikan yang tersebar di dua provinsi yakni Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara dibawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA). Sarana pendidikan untuk menunjang perkembangan kemanusiaan yang dibangun oleh Gereja antara lain berjumlah 1 Taman Seminari, 11 TK, 102 SD, 12 SMP, 9 SMA dan 1 Sekolah Tinggi, (Verval Yayasan, 2019). Ada beberapa sekolah yang dibangun sendiri namun ada juga beberapa sekolah yang digabungkan menjadi satu kolese, misalnya kolese Xaverius Ambon, Kolese Yos Sudarso Aru, dan sementara ini dipersiapkan yakni Kolese Petrus Canisius di pulau Buru untuk mendukung pendidikan kemanusiaan disana. Gereja harus terus bertumbuh dan senantiasa menjalankan dan mempertahankan misi ini dengan menyajikan berbagai peluang pendidikan bagi masyarakat agar aspek yang menguntungkan ini mampu mewujudkan pendidikan budaya manusia yang seutuhnya.

3.2.2. Mempererat Persaudaraan dan Toleransi

Peran selanjutnya yakni menimbulkan kembali rasa persaudaraan dan toleransi yang telah hilang. Inilah yang menjadi salah satu misi Gereja yakni menjalankan misi perdamaian yang hancur akibat konflik. Uskup Mandagi dalam surat gembala Prapaskah 27 Januari 2003 yang sangat relevan dengan kondisi di Maluku kala itu, menekankan soal bertumbuh bersama dalam kasih persaudaraan melalui toleransi. Dalam suratnya ini, beliau menekankan tentang bertumbuh bersama-sama dalam kasih persaudaraan dan toleransi, (Wuritimur, 2019:257). Pada surat Gembala dalam perayaan Natal 2002 dan Tahun Baru 2003 pun, Uskup Mandagi mengajak segenap umat beriman agar menjalani tahun baru sebagai tahun tanpa konflik dan kekerasan atau tahun perdamaian. Selain seruan gembala, ada beberapa tindakan dari sang Uskup Mandagi dalam memperlihatkan dan mendukung adanya perdamaian dan toleransi di Ambon yakni acara Munas UNINDO XI oleh para pastor diselenggarakan di Islamic Center (Mandagi, 2018). Begitu pula dengan kegiatan MTQ di Ambon yang didorong bahkan dipanitiakan oleh orang-orang Kristen. Langkah-langkah ini serentak ingin menunjukkan bahwa rasa kepedulian antar sesama manusia dan golongan mengangkat kembali semboyan *pela-gandong*, dan mencerminkan adanya perdamaian

dan toleransi. Tidak ada kedamaian di Maluku jika semua masyarakat Maluku tidak memiliki persaudaraan dan toleransi.

3.2.3. Memulihkan Ekonomi

Konflik besar yang terjadi di Maluku mengakibatkan penetapan ekonomi darurat. Semua orang merasa sengsara, menderita dan terancam dalam mencari nafkah. Berbagai fasilitas ekonomi dijarah dan dibakar seperti perkebunan, pertokoan, warung-warung, pasar dan sebagainya, ditambah lagi sudah menelan korban jiwa sebanyak 32 orang dan 200-an rumah dibakar sehingga masyarakat mengalami kepanikan dan ketakutan dalam mencari nafkah, akhirnya peristiwa ini membawa malapetaka dan kelaparan bagi masyarakat Maluku sehingga diharuskan adanya pemulihan kembali ekonomi yang telah merosot (Wuritmur, 2019:323). Gereja telah mengambil langkah dengan cara menyerukan agar pemerintah harus membantu dan memulihkan kembali ekonomi di Maluku. Pemerintah harus bertanggungjawab atas masyarakat yang terkena konflik ini. Maka pemerintah hendaklah memberikan dan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang belum atau kehilangan pekerjaan, mereka yang mengungsi karena kerusakan hendaklah diberikan kembali tempat-tempat yang layak (Wuritmur, 2019:325). Gereja pun mengambil langkah agar membantu masyarakat keluar dari zona gelap ini. Gereja membangun CUHA (Credit Union Hati Amboina) agar membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi. Kemudian Gereja pun mengandalkan asset tanah yangizinkan untuk membangun rumah bagi para pengungsi seperti di Lateri, Passo, Galala, dan Benteng. Gereja mengalokasikan beberapa asset tanah sebagai ladang penghasil makanan untuk menumbuhkan ekonomi umat setempat, dan hasilnya dapat dijual ke pasar untuk menumbuhkan perekonomian. Lewat sektor pendidikan juga Gereja tidak memaksakan adanya pembayaran uang sekolah yang mahal terutama bagi keluarga berekonomi rendah, anak yatim-piatu agar anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Serentak Gereja telah membuka lapangan pekerjaan yang diperoleh lewat perkantoran seperti CUHA, Guru di sekolah, Dosen di Sekolah Tinggi Katolik, tenaga-tenaga kepegawaian di kontor komisi-komisi Keuskupan (Mandagi, 2018). Gereja senantiasa membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi Maluku yang memburuk akibat konflik. Hanya dengan cara ini masyarakat Maluku akan kembali hidup dalam kesejahteraan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pihak keamanan dan pemerintah akan kembali diakui.

3.3. Peran Fasilitator Kemanusiaan

Perjuangan memperjuangkan kemanusiaan dan toleransi di Maluku pasca konflik tidaklah mudah. Disini Gereja Katolik tidak bergerak sendirian melainkan memperoleh dukungan akan pikiran, upaya dan tindakan memperjuangkan kemanusiaan yang sama dari para tokoh dan pemeluk agama di Maluku (Katolik, GPM, Islam, Budha, Hindu), Pemerintah daerah, para pemeluk agama yakni masyarakat Maluku, dan para pengarus sosial-budaya yang sudah tertanam dan mendarah-daging dalam kehidupan *pela-gandong* masyarakat Maluku.

3.3.1. Tokoh/Pemuka Agama

Dalam membangun perdamaian dari konflik tersebut, Gereja Katolik Kesukupan Amboina tidak bergerak sendirian melainkan bersama seluruh agama yang lain yakni GPM, Islam, Hindu, dan Budha berupaya keras dalam mendukung dan memperjuangkan kembali akan perdamaian kemanusiaan atas konflik yang telah terjadi di Maluku. Dalam upaya memantapkan kerukunan itu, hal serius yang harus diperhatikan adalah fungsi pemuka agama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemuka agama, tokoh masyarakat adalah figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing, sehingga apa yang diperbuat mereka akan dipercayai dan diikuti secara taat. Selain itu mereka sangat berperan dalam membina umat beragama dengan pengetahuan dan wawasannya dalam pengetahuan agama. Para tokoh agama memberikan reaksi yang positif dalam menolak kerusuhan di Maluku, dan hal itu terlihat jelas ketika ada tindakan penolakan lewat seruan terhadap Kofi Annan (Sekretaris Jendral PBB) oleh seluruh pemuka dan tokoh agama di Maluku pada tanggal 29 April 2002. Upaya seruan perdamaian lainnya terlihat pada 4 Februari 2003 para pemimpin agama di Ambon (MUI, GPM, Katolik) dimana seruan ini membuka jalan dialog yang baik agar menemukan jalan keluar yang adil dan aman, bukan dengan kekerasan dan perang (Wuritimur, 2019:450-460).

3.3.2. Pemerintah Daerah

Pemerintah juga berperan dan bertanggung jawab demi terwujudnya perdamaian. Dalam hal ini pemerintah sebagai pelayan, mediator atau fasilitator merupakan salah satu elemen yang dapat memperjuangkan kemanusiaan tersebut. Upaya pemerintah sangat penting ketika konflik terjadi, dimana pemerintah Provinsi Maluku dan didukung oleh TNI/POLRI, para tokoh masyarakat, kelompok pemuda Katolik, Protestan dan Islam dalam menyerukan deklarasi menahan diri mengehentikan pertikaian Maluku, bahkan mereka turun ke jalan-jalan, measang spanduk demi menuarakan perdamaian pada 23 Januari 1999. Salah satu cara untuk mencegah konflik semakin meluas yakni menetapkan status provinsi Maluku dan provinsi Maluku Utara menjadi wilayah darurat sipil. Pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah pusat mengenai penyelesaian konflik hingga pada perjanjian di Malino. Adanya pendekatan rehabilitasi yakni penanganan bersifat darurat bagi korban kekerasan, bantuan bagi para pengungsi, perumahan pengungsi, bantuan ekonomi dan sarana-sarana vital serta fasilitas pemberdayaan lainnya (Samsudin, 2020:44). Ketika keadaan mulai membaik dan kondusif, pemerintah pun berperan penting dengan mengambil langkah mengembalikan para pengungsi, membangun kembali sarana-prasarana yang rusak, membantu seluruh agama dalam membangun kembali fasilitas ibadah, dan membuat banyak hal lain yang mengarah pada perdamaian Maluku (Wuritimur, 2019:400).

3.3.3. Masyarakat

Sikap tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antar umat beragama merupakan indikasi dari konsep trilogi kerukunan. Seperti dalam pembahasan sebelumnya upaya mewujudkan dan memelihara kerukunan hidup umat beragama, tidak boleh memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Karena hal ini menyangkut hak asasi manusia (HAM) yang telah diberikan

kebebasan untuk memilih baik yang berkaitan dengan kepercayaannya (DUHAM Pasal 18, jo. UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1), jo. UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2). Kerukunan antar umat beragama dapat terwujud dan senantiasa terpelihara, apabila masing-masing umat beragama dapat mematuhi aturan-aturan yang diajarkan oleh agamanya masing-masing serta mematuhi peraturan yang telah disahkan Negara atau sebuah instansi pemerintahan. Umat beragama tidak diperkenankan untuk membuat aturan-aturan pribadi atau kelompok, yang berakibat pada timbulnya konflik atau perpecahan diantara umat beragama yang diakibatkan karena adanya kepentingan ataupun misi secara pribadi dan golongan. Dalam mengupayakan kemanusiaan dalam konflik Maluku, masyarakat pun turut bereaksi menolak konflik tersebut. Sebagai contoh, salah satu upaya dari masyarakat yakni seruan untuk menangkap provokator konflik, ada pun juga reaksi dari kelompok masyarakat Gerakan Perempuan Peduli (GPP), dan masyarakat Maluku pada umumnya dalam menolak konflik yang telah menghancurkan kemanusiaan di Maluku (Wuritmur, 2019:455). Selain itu adanya komitmen dari kedua belah pihak yakni Islam dan Kristen dengan dorongan dari para tokoh agama, pemerintah, pihak keamanan, LSM, dan juga faktor sosial budaya *pela-gandong* dengan tegas menghentikan konflik yang terjadi.

3.3.4. Peran Sosial-Budaya

Selain peran diatas, peran sosial dan budaya yang kuat sangat mempengaruhi perdamaian di Maluku. Masyarakat Maluku sejak dahulu (sebelum konflik) sudah menghidupi rasa persaudaraan yang tinggi di seluruh daerah-daerah. Secara sosial masyarakat Maluku menganggap sesama orang Maluku mulai dari Halmahera hingga Tenggara Jauh adalah saudara. Semboyan *pela-gandong*, *potong di kuku rasa di daging*, *Maluku satu darah*, dan berbagai semboyan lainnya yang mencerminkan persatuan masyarakat Maluku sebagai keluarga dan tak terpisahkan apalagi hingga saling membunuh. Secara budaya juga sama dalam hal menghargai sesama masyarakat Maluku walaupun terdiri dari banyak pulau. Salah satu nilai yang membudaya dalam kehidupan masyarakat Maluku ialah *pela-gandong* yang menjadi wujud kebudayaan warisan para leluhur Maluku yang hidup secara nyata dalam sikap gotong royong dan persaudaraan (Althien Pesurnay, 2021:20). Nilai-nilai luhur ini sudah dihayati dalam kehidupan masyarakat Maluku sejak lama bahkan sebelum konflik terjadi. Sehingga ketika konflik terjadi, timbulah penghayatan kembali akan nilai-nilai luhur sebagai ciri khas orang Maluku diingat kembali, maka masyarakat dengan sendirinya sadar bahwa konflik telah memutus rantai persaudaraan dan telah merugikan masyarakat Maluku.

PENUTUP

Yesus Kristus telah membangun Gereja-Nya dalam dunia dan memberikan kuasa kepada para pengganti-Nya untuk menjalankan misi di dunia. Inilah tugas perutusan sebagai panggilan hidup Gereja yang harus memperjuangkan kebenaran tentang Kerajaan Allah di dunia. Yesus berkehendak agar Gereja-Nya harus berperan aktif dalam dunia yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Terlebih dari pada itu, Gereja hendaknya menjaga, melestarikan dan

memperjuangkan martabat manusia. Misi yang mulia ini menjadi semangat Gereja Katolik khususnya Keuskupan Amboina untuk memperjuangkan kemanusiaan yang telah merosot karena konflik di Maluku. Peristiwa besar ini terjadi sekitar tahun 1999 hingga 2003/2004, dan termasuk peristiwa kemanusiaan terbesar dalam sejarah masyarakat Maluku. Banyak hal yang dikorbankan dan menjadi dampak dari perang saudara ini. Rumah-rumah dibakar, tempat-tempat ibadah dihancurkan, terjadi pembunuhan, dendam dan provokasi untuk perang, sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa yang meninggal dunia. Gereja Katolik berperan lewat keberanian gembala keuskupan Amboina yang berani tampil di depan memperjuangkan kemanusiaan.

Gereja Katolik dibawah pimpinan Mgr. Mandagi serta dibantu dan didukung oleh segenap tokoh-tokoh agama dan pemerintah, berani bertindak dan bersuara dalam pelbagai kesempatan agar konflik dan kekerasan dihentikan. Selain itu, gereja pun telah berusaha membantu pemerintah dalam berbagai cara untuk mengentikan konflik, menyuarakan perdamaian dan toleransi, membangun kembali sarana pendidikan agar anak-anak Maluku dapat memperoleh pendidikan yang layak, membantu memulihkan ekonomi lewat berbagai program dan lapangan pekerjaan dalam keuskupan.

Manusia-manusia modern harus hidup dalam perdamaian, cinta kasih dan toleransi. Lewat peristiwa yang panjang ini, Gereja Katolik selalu mengajak dunia agar terbuka bagi dunia dan mengasihi sesama, (GS:45). Misi Gereja yang mulia ini kian lama kian berhasil memperdamaikan situasi dan menyelamatkan kemanusiaan. Walaupun ada perbedaan budaya dan agama, Gereja senantiasa berada dan berkarya dalam misi Kristus agar seluruh masyarakat Maluku tetap menjadi satu, sama seperti Yesus berdoa kepada Bapa-Nya di Surga “*Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.* (Yoh. 17:21)”.

PUSTAKA

Buku

Dokumen Konsili Vatikan II., 2021, *Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral tentang Tugas Gereja dalam Dunia Dewasa ini*, No 19. DOKPEN KWI, Jakarta.

Wuritimur, Amrosius.,2019, *Suara Kemanusiaan di Tengah Tangisan Maluku*. Kanisius, Yogyakarta.

Mandagi, Mgr. P. C., 2009, *Buah-buah Iman dalam Peziarahan Iman*. Hati baru, Jakarta.

Mandagi, Mgr. P. C., 2013, *Umat Yang Terkasih*. Hati baru, Jakarta.

Kitab Suci Deuterokanonika (Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta 1993).

Jurnal

Ming, David., 2021, *Peranan Gereja dalam Sistem Pemerintahan yang baik di Indonesia*. Jurnal Kadesi: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, Vol 1, No 1.

- Pesurnay, Althien J., 2021, *Muatan Nilai dalam tradisi Pela-Gandong di Maluku*. Jurnal Adat dan Budaya, Vol 3, No 1.
- Indrawan, Jerry dkk., 2021, *Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, vol 4, No 1.
- Safi, Jamin., 2017, *Konflik Komunal: Maluku 1999-2000*. Jurnal STKIP, vol 12, No 2.
- Suaedy, Ahmad dkk., 200, *Luka Maluku: Militer Terlibat*. Institut Studi Arus Informasi, Yogyakarta.
- Srikandi, Ratna Dewi., 2006, *Dampak Kerusuhan Maluku terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Kota Ambon*. Jurnal pendidikan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Suparlan, Parsudi., 2001, *Permulaan Kerusuhan Ambon Tahun 1999 dan Penanganannya*. Jurnal Polisi, vol. 3.
- Buamona, B. Samsudin., 2020, *Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Konflik Agama di Maluku*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, vol 6, No 2. STAI Babusalam.

Internet

- Rahawarin, Bernard Antonius. Artikel “Sejarah singkat Agama Katolik masuk ke Maluku ”, Diakses dari <https://karina.or.id/keuskupan-amboina> pada Jumat 24 Februari 2023.
- Riyanto, Geger. Artikel berita, “*Konflik Agama: Intoleransi atau Perebutan Lapak?*”(15 Juni 2016), diakses dari <https://dw.com> pada 23 Mei 2023.
- Nisa, Anisa. Artikel berita, “*Mengingat kembali Sejarah Singkat Konflik Ambon: Akar Permasalahan dan Penyelesaian*” (15 Desember 2021), diakses dari kompasiana.com pada 20 Mei 2023.
- Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA). Artikel berita, “*Verifikasi dan Validasi Data Sekolah Naungan YPKKA*” (2019), diakses dari vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id pada 21 Mei 2023.
- Mgr. P.C. Mandagi. Artikel berita, “*Saya Membela Kemanusiaan*” (16 Maret 2018), diakses dari hidupkatolik.com pada 21 Mei 2023.
- Hoesodo, dkk. Artikel berita, “*Resolusi Konflik Agama di Pulau Ambon*” (2018), diakses dari etd.repository.ugm.ac.id. pada 21 Mei 2023.